

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Studi Tentang Implementasi Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat disimpulkan belum maksimal, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam kelengkapan berkas masih sering di temukan bahwa terdapat banyak pemohon yang pada saat mendaftar tidak membawa berkas dengan lengkap, sedangkan jika berkas tidak lengkap maka petugas bagian loket tidak akan melanjutkan proses pendaftarannya. Namun ada juga kendala pada saat proses pendaftaran masih sering terjadi gangguan pada jaringan sehingga dapat memperlambat proses pendaftarannya, karena dalam proses pendaftaran semuanya menggunakan aplikasi.
2. Dalam proses pengukuran juga masih sering ditemui kendala yang menghambat proses pengerjaan, yaitu salah satunya pada saat proses pengukuran tanah jika tidak saksi tidak hadir maka petugas tidak bisa mengukur tanah tanpa persetujuan dari para saksi dan juga tetangga batas. Berikutnya kendala pada penanaman pilar, jika pemohon tidak terlebih dahulu menanam pilar maka petugas tidak akan tahu batas – batas tanah sehingga proses pengukuran ditunda sampai dengan pilar ditanam terlebih dahulu. Dan pada saat cuaca tidak mendukung seperti hujan atau mendung maka petugas tidak bisa menggunakan alat untuk mengukur tanah.

3. Dalam proses percetakan sertifikat tanah juga dikerjakan oleh dua petugas, namun petugas yang satunya masih dalam tahap pembelajaran / tahap penyesuaian sehingga memerlukan sedikit waktu untuk mencetak sertifikat tanah.
4. Adanya aplikasi sentuh tanahku yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek proses pendaftaran berkas dan juga tedapat berbagai macam persyaratan.
5. Adanya bimtek yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang bagi pegawai demi kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
6. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat salah satunya yaitu mengadakan kegiatan mediasi bagi tanah yang bermasalah demi mendapatkan jalan keluar.

6. 2. SARAN

Dari hasil penelitian yang dirangkum mengenai Studi Tentang Implementasi Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Kupang, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Persyaratan harus dicetak dan dibagikan kepada setiap pemohon bukan dengan penulisan sebuah nota kecil yang kurang dipahami dan dimengerti oleh semua pemohon sebagaimana yang dipraktekkan selama ini.
2. Pilar harus di tanam terlebih dahulu oleh pemohon agar tidak menghambat proses pengukuran tanah oleh petugas, dan harus ada komunikasi yang baik antara pemohon dan para saksi dalam menentukan jadwal pengukuran agar yang bersangkutan juga hadir dengan lengkap.
3. Proses percetakan tanah diberikan kepada petugas yang mahir atau yang sudah berpengalaman dalam mencetak agar tidak memakan waktu yang cukup lama.

4. Memberikan sosialisasi pada setiap kelurahan tentang aplikasih sentuh tanahku, dan penjelasan secara detail terhadap aparat kelurahan agar dari kelurahan memberikan sosialisasi pada masyarakat yang tidak sempat hadir pada saat sosialisasi berlangsung.
5. Memberikan bimtek / diklat secara merata terhadap pegawai dengan cara membagi pergelombang agar tidak memperhambat pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
6. Komunikasi yang baik antara kedua bela pihak dalam mengatur jadwal pertemuan demi berlangsungnya kegiatan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Agostiono, 210, Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Rajawali Pers
Cipedak-Jagakarsa Jakarta Selatan
- H. Syamsuni HR, 2019, Statistik dan Metodologi Penelitian Dengan Implementasi Pembelajaran Android, CV Karya Bakti Makmur (KBM)
- Habil Maranda Magfirullah, 2020, Teori Dan Model Implementasi Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya,
- Haryati, 2007, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5. No. 1, UNTAG Semarang,
- Husaini, Usman, 2006, Manejemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta
- Jimmy Joses Sembiring SH, M.Hum, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah,
- Muhammad Ali, 2017, Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia
- Nanang Fatah, 2008, Landasan Manejemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Replay, Rendal B. And Grace A. Franklin, 1986, Policy Implementation and Bureaucrazy, Second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illions
- Syaiful Sagala, 2009, Manejemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Alfabeta, Bandung
- Tabrani Rusyan, 1989, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tarjo S.Sos, M. A B, Agustus 2019, Metode Penelitian Sistem 3x Baca, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Uddin B. Sore, Sobirin, 2017, Kebijakan Publik, Makassar CV: Sah Media
- Wahab, Solichin A, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM, 2013

Jurnal;

- (Skripsi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro)
- Akib, Haedarndan Antonius Tarigan, 2008, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan; Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabri Makassar,
- Anisa Ratna Widuri Maesaroh, 2016 Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan
- Chika Zafa Librasti, Muhammad Basri dan Minuddin, 2020, Implementasi Progran Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gunung Jati Kendari, (Skripsi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
- Eka Prasajo dan Mawar, 2017, Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Selatan)
- Maria Florida Seran, 2020, Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah, (Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang).
- Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang,

Link:

- <http://badanpenghubung.sumutprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-sub-bagian-tata-usaha/>
- <http://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id.dinpertanahan.benermeriahkab.go.id>
- <http://pertaru.kukarkab.go.id/pertanahan.php?m=Pengkajia dan Penanganan Sengketa Tanah>
- <https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/>

https://Klikpajak.id/blog/berita-regulasi/bphtb-pengertian-objek-tarif-cara-menghitung-dan-syarat-mengurus/#Cara_Menghitung_Tarif_BPHTB

<https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/fungsi-sertifikat-tanah/>

<https://Sibarsripi-pupr.pu.go.id>

https://www.alihamdan.id/implementasi/#1Pengertian_Implementasi_Secara_Umum

<https://www.batukarainfo.com/wiki/nusa-tenggara-timur>

<https://www.historia.id/politic/articles/cerita-menarik-di-balik-Pembentukan-provinsi-ntt>

www.bandungkabupaten.co.id.tugaspokokmemimpin

Sumber Lain :

Bagian TU Kantor Pertanahan Kota Kupang

Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Krisna Andika Andinata selaku petugas pengukuran.

Hasil wawancara dengan Bapak I Made Sutra Mahardika selaku kepala seksi pengukuran

Hasil wawancara dengan Bapak Morel Daniel Ay selaku pegawai TU

Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Koilal selaku pemohon / masyarakat

Hasil wawancara dengan Bapak Simon Zogen selaku pemohon / masyarakat

Hasil wawancara dengan Bapak Wandy W. Djula selaku petugas loket

Hasil wawancara dengan Ibu Ani C. R. Jala selaku petugas loket

Hasil wawancara dengan Ibu Charoline Komi Pada selaku petugas sengketa tanah (seksi 5)

Hasil wawancara dengan Ibu Marlin Karolina Seran selaku petugas pengukuran

Hasil wawancara dengan Ibu Mega R. Padji selaku petugas loket

Hasil wawancara dengan Ibu Rania Aulia selaku pemohon / masyarakat

Hasil wawancara dengan Ibu Reza Manafe selaku petugas sengketa tanah (seksi 5)

Hasil wawancara dengan Ibu Riska S. Ballo selaku petugas penetapan hak (seksi 2)

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti A. Polonia Bunga selaku petugas loket

Hasil wawancara dengan Ibu Yovita Seran selaku pemohon / masyarakat

Undang – Undang:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang pendaftaran Tanahs

